

PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT PESISIR (PMP) DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

THE ROLE OF COMMUNICATION ON TRADITIONAL FISHERMAN EMPOWERMENT AT THE COASTAL COMMUNITIES (PMP) IN SOUTHEAST MALUKU

Cawalinya Livsanthi Hasyim dan Elisabeth Cory Ohoiwutun

Politeknik Perikanan Negeri Tual

Jl. Raya Langgur – Sathean, Km. 6 Kabupaten Maluku Tenggara 97611

cawalinya_84@yahoo.com ; elisabeth_c_ohoiwutun@yahoo.com

Diterima : 11 Januari 2017

Direvisi : 30 Mei 2017

Disetujui : 22 Juni 2017

ABSTRACT

The coastal areas of Southeast Maluku Regency has an abundant natural resources. The utilization of the coastal ecosystem and resources in Southeast Maluku Regency is not yet optimal. This condition is caused by the limited ability of the community in both financial and knowledge aspects; limited access to capital, technology, information and markets: community welfare improvement programs through coastal community development programs (PMP) which have not been able to reach all levels of communities living in coastal areas of Southeast Maluku. The purpose of this research is to analyze the role and strategy of communication in the implementation of the program of empowerment of fishermen in coastal communities in Southeast Maluku, and to analyze the most possible internal and external factors for the development of fishermen empowerment in coastal communities in Southeast Maluku Regency. The data used in this study are primary and secondary data. The respondents in this study are picked based on purposive sampling: there are 30 respondents, consisting of local fishery boards and fishery business groups in Ohoi Letvuan, Ohoi Namar, and Ohoi Ohoidertutu. Data in this study are processed using descriptive and SWOT analysis. Based on the results of the analysis, the implementation of fishermen empowerment programs on coastal communities in Southeast Maluku has not been optimal. This condition happens because the empowerment program conducted on the group business has not reached the final step which is the marketing of the products. The most likely alternate strategy is exploiting good teamwork between group members to avoid threats and seizing. Opportunities to improve businesses by minimizing indirectly paid sales.

Keywords: Communications, Coastal Communities, Traditional Fisherman Empowerment, Development Strategies

ABSTRAK

Wilayah pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan ekosistem dan sumber daya alam pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara sampai saat ini belum optimal. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan masyarakat baik secara finansial maupun pengetahuan; terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan masyarakat pesisir (PMP) yang dilakukan belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Kabupaten Maluku Tenggara. Tujuan dari penelitian ini menganalisis peran dan strategi komunikasi terhadap pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan nelayan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang paling memungkinkan untuk pengembangan pemberdayaan nelayan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 30 responden yang terdiri dari Dinas Kelautan dan kelompok-kelompok usaha perikanan di Ohoi Letvuan, Ohoi Namar dan Ohoi Ohoidertutu. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan program pemberdayaan nelayan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara belum optimal. Kondisi ini terjadi karena program yang dilakukan terhadap usaha kelompok tidak sampai pada tahap akhir yaitu pemasaran hasil penjualan. Alternatif strategi yang paling memungkinkan adalah memanfaatkan kerja sama yang baik antar anggota kelompok untuk menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan usaha dengan meminimalkan penjualan yang tidak dibayar secara langsung.

Kata Kunci : Komunikasi, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Nelayan Tradisional, Strategi Pengembangan

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan, pada umumnya adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan aset serta sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil merupakan persoalan utama di kawasan pesisir. Dengan penghasilan yang masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional, mereka bukan saja dihadapkan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, namun juga dengan persoalan manajemen keuangan dan pemasaran hasil produksinya.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, karena didukung oleh adanya ekosistem dan sumber daya alam hayati, di mana ekosistem dan sumber daya alam tersebut dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat terutama dari sektor perikanan yang menunjang perekonomian daerah. Namun secara umum, pemanfaatan ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Tenggara sampai saat ini belum optimal.

Sebagian besar penduduk yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih tergolong berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan masyarakat baik secara finansial maupun pengetahuan; terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, informasi dan

pasar; belum terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) yang dilakukan belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan, baik melalui pemberian bantuan alat tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pembangunan masyarakat pesisir. Program Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) merupakan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena program pembangunan masyarakat pesisir yang dilakukan secara bertahap dan tidak menyeluruh pada semua masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara.

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan dan masyarakat pesisir masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan dan distribusi hasil olahan perikanan ke pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kinerja yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan program pengembangan pembangunan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara dan menganalisis strategi faktor internal dan eksternal yang paling memungkinkan untuk pengembangan pembangunan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara. Manfaat dari penelitian ini adalah Sebagai sarana informasi bagi pemerintah daerah, *stakeholders*, masyarakat pesisir dan semua pihak yang berkaitan dengan pentingnya program pembangunan masyarakat pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara.

Kusnadi (2002) mengemukakan bahwa kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Dalam kenyataan, perbedaan masyarakat pesisir atau pemukiman sukar dibedakan karena sifat masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang saling bertumpang tindih. Masyarakat menurut Satria (2002) yaitu masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil). Komunitas kecil tersebut memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Mempunyai identitas yang khas
2. Terdiri dari penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas sehingga saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian
3. Bersifat beragam dengan diferensiasi terbatas

4. Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar diluar.

Masyarakat pesisir yang berjenis desa pantai dan desa terisolasi dicirikan oleh sikap mereka terhadap alam dan manusia. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir baik sebagai nelayan, pengolah maupun pedagang ikan dalam kegiatan usaha perikanan. Program pembangunan masyarakat pesisir atau disebut *Coastal Community Development Project - International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD)* merupakan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan *Financing Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. Program tersebut sebagai respon langsung terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan yang sejalan dengan program IFAD (DKP Kabupaten Maluku Tenggara, 2015).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan sasaran terfasilitasinya 70.000 rumah tangga, 320.000 orang di 180 desa pesisir dan pulau-pulau kecil di dua belas kabupaten atau kota, sepuluh provinsi; dan terfasilitasinya pusat pembelajaran di satu kabupaten yaitu Kabupaten Bandung (DKP Kabupaten Maluku Tenggara, 2015).

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu dari dua belas

kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mengelola Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) berdasarkan keberhasilan Maluku Tenggara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan proyek sebelumnya, termasuk perbaikan sejumlah masyarakat miskin pesisir dan pulau kecil, potensi dalam meningkatkan pendapatan dari hasil kelautan dan perikanan lainnya, dan cakupan dalam meningkatkan kegiatan di kabupaten.

Penelitian Amanah (2007) tentang pengembangan masyarakat pesisir mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif yang nyata antara kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh penyuluh terhadap perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya pesisir yang dimiliki. Selain faktor keterisoliran dan kompetensi komunikasi, strategi komunikasi pun berpengaruh terhadap efektifitas komunikasi. Harris (Bessete & Rajasunderam, 1996) menyatakan bahwa pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif perlu dikembangkan untuk mengembangkan masyarakat di tingkat bawah melalui pendekatan pendidikan non formal.

Pemberdayaan memiliki berbagai interpretasi. Pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses dan program. Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan

dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

Bowling dan Barbara (dalam Amanah, 2007) mengemukakan bahwa program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan, dan pengalaman dengan masyarakat. Bersama-sama masyarakat, dapat dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada pembentukan perilaku masyarakat. Pemberdayaan sebagai sebuah program mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks ini, pelaksanaan program pemberdayaan dibatasi waktu, sehingga tampak sebagai kegiatan keproyekan. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi pelaksana program maupun komunitas target, karena sering terjadi kegiatan terputus di tengah jalan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program.

Pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup dua dimensi, yaitu budaya dan struktur sosial (Satria, 2002). Selain itu, pemberdayaan dalam komunitas nelayan akan lebih berhasil jika menerapkan prinsip kejelasan tujuan, prinsip dihargainya pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip keberlanjutan, prinsip ketepatan kelompok sasaran atau tidak bias pada nelayan pada strata maupun golongan tertentu, dan prinsip kesetaraan *gender*, artinya baik pria maupun wanita secara aktif diakui hak-haknya dalam masyarakat, memiliki status dan peran sesuai budaya setempat dan terlibat dalam proses

pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian Mubyarto dan Dove (1984) menyimpulkan bahwa modernisasi perikanan melalui introduksi kapal-kapal motor telah menimbulkan jurang yang bertambah lebar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu memanfaatkan teknologi tersebut, bahkan introduksi budidaya tambak udang yang padat modal hanya berpihak pada kelompok kaya atau dengan perkataan lain pembangunan berakibat pada menguatnya marjinalisasi kelompok miskin. Dampak positif maupun negatif dari modernisasi perikanan, khususnya bagi masyarakat nelayan, petani petambak, maupun kelompok masyarakat pesisir yang lain (pengolah hasil laut, pemberi jasa wisata bahari dan lain-lain) perlu diantisipasi, yaitu melalui penerapan paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada aspek manusianya. Implikasinya adalah pembangunan akan berkelanjutan (*sustainability*), karena program-program pembangunan menciptakan manusia-manusia yang berdaya dan mandiri. Soedijanto (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang hanya menekankan pada produktivitas, justru hanya menimbulkan ketergantungan petani pada pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, peran komunikasi pembangunan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam menghadapi modernisasi. Upaya pemberdayaan nelayan kecil menurut Satria (2001) perlu memahami struktur sosial masyarakat nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial-budaya perlu diperhatikan,

sehingga program tidak lagi hanya bersifat “ingin cepat selesai.”

Salusu yang diacu dalam Purwanto (2006) berpendapat bahwa strategi memiliki determinan-determinan umum terdiri dari komponen-komponen, yaitu: (1) Tujuan dan sasaran, (2) Lingkungan, (3) Kemampuan internal, (4) Kompetisi, (5) Pembuat strategi, (6) Komunikasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara dikhususkan pada Desa Letvuan untuk kelompok pengolahan rumput laut, Desa Namar untuk kelompok penangkapan ikan dan Desa Ohoidertutu untuk kelompok pengolahan ikan. Penelitian dilakukan selama satu tahun dengan tahapan tahapan sebagai berikut: survei awal, pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara mendalam dengan alat bantu kuesioner terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu masyarakat pesisir dan instansi yang terkait dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka (*library research*) pada tesis, jurnal ilmiah, internet, dan menggunakan informasi-informasi yang dihasilkan oleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian.

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan persyaratan bahwa responden adalah pelaku (individu, atau lembaga) yang memengaruhi pengambilan kebijakan, baik langsung maupun tak

langsung terhadap peran komunikasi dalam pengembangan pemberdayaan nelayan tradisional pada masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yang berjumlah tiga puluh responden yang terdiri dari Dinas Kelautan dan kelompok - kelompok usaha perikanan di Ohoi Letvuan, Ohoi Namar dan Ohoi Ohoidertutu. Dalam penelitian, tahapan penelitian bobot dan *rating* faktor internal dan eksternal melibatkan perwakilan masyarakat pesisir (khusus pada desa-desa yang diteliti) dan dinas pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang berkaitan dengan penelitian.

Pengolahan serta metode analisis data dilakukan dengan menganalisis peran dan strategi komunikasi dalam pengembangan pemberdayaan nelayan tradisional pada masyarakat pesisir, dan analisis perumusan strategi yang melalui tahapan: (1) analisis matriks IFE-EFE; (2) analisis matriks IE; (3) dan analisis matriks SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan pembangunan yang dapat dikomunikasikan untuk menghadapi permasalahan masyarakat pesisir di tiga desa yang menjadi lokasi penelitian serta merupakan desa binaan yang mendapat bantuan dari pemerintah yakni peningkatan keterampilan nelayan dalam menggunakan teknologi penangkapan, mampu mengelola hasil tangkapan tersebut dan peningkatan kemampuan manajemen usaha, pemasaran produk serta membangun jejaring (*network*) dengan mitra usaha guna memperluas usaha tersebut. Dengan demikian, pesan-pesan atau materi dalam komunikasi pembangunan masyarakat pesisir tidak sekedar mentransfer

informasi saja, tetapi menyangkut aspek transformasi keadaan dari kondisi sekarang yakni nelayan yang masih terpinggirkan, menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Komunikasi memegang peran nyata dalam mengembangkan media untuk memobilisasi masyarakat dan pemerintahnya. Fenomena berlangsung di salah satu desa yakni Ohoi Namar yakni kerja sama antara nelayan dengan penyuluh/pendamping dalam pengelolaan kelestarian sumberdaya laut, dalam hal ini bantuan berupa alat penangkapan serta cara penggunaannya. Akan tetapi, masih belum ada pengawasan dari pihak terkait untuk area penangkapan di Ohoi Namar. Seperti pada hasil wawancara dengan Bapak Abner Ohilira yang merupakan ketua kelompok penangkapan ikan "Kump. Kakap":

"Kami butuh pengawasan di area penangkapan ikan karena masih ada yang menggunakan pengeboman dalam mencari ikan, sehingga karang-karang hancur dan kami tidak bisa menangkap ikan yang banyak."

Keluhan lainnya terjadi pada kelompok pengolahan rumput laut dan kelompok pengolahan abon ikan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu komentar dari Ibu Yohana yang merupakan Ketua Kelompok Pengolahan Rumput Laut "Vat-Vat Kanew" di Ohoi Letvuan mengatakan bahwa *"pergantian pendamping/penyuluh membuat kurangnya komunikasi dan kami harus beradaptasi lagi dengan pendamping baru."* Pernyataan lainnya dari Ketua Kelompok Pengolahan Abon Ikan "kump. Melati" di Ohoi Ohoidertutu, Ibu Evelina, dalam wawancara pada 24 Mei 2016 mengatakan bahwa: *"belum ada tempat untuk memasarkan produk kami."*

Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa nelayan memiliki kepedulian atas degradasi lingkungan yang dipicu oleh kebutuhan ekonomis. Nelayan mengeluhkan minimnya penegakan hukum dan belum adanya distribusi pemasaran hasil produk yang jelas.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurangnya peluang untuk mengelola usaha pengolahan yaitu kebutuhan uang yang mendesak, keterbatasan waktu dan modal usaha, dan pemasaran produk. Dengan demikian, orientasi komunikasi pembangunan di kawasan pesisir cukup berat karena bukan hanya dituntut mampu mengubah pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan membantu memperkuat struktur sosial ekonomi nelayan, sehingga lebih kuat dalam menghadapi tantangan.

Strategi komunikasi pembangunan bukan hanya menyangkut meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi bagaimana menciptakan ide atau pesan melalui penyebaran informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat sehingga membawa perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mampu melihat masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bergantung dari pihak lain.

Pada program *community development*, pesan komunikasi harus dapat memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan SDM dan SDA sebaik mungkin. Merencanakan suatu pesan pembangunan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang menjadi kebutuhan sasaran dengan mengenal kondisi sosial komunitas setempat dan keadaan alam setempat untuk dapat memecahkan masalah.

Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat di tiga desa yakni Ohoi Letvuan, Ohoi Namar dan Ohoi dertutu adalah hasil tangkapan ikan, pengolahan rumput lau dan pengolahan abon ikan. Jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menjawab permasalahan yang dihadapi maka yang terjadi adalah perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap bahkan terjadi perubahan peningkatan pendapatan. Hal ini berarti tujuan komunikasi pembangunan untuk menyampaikan informasi atau ide-ide pembangunan yang membawa perubahan masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat akan mengubah perilakunya, semakin berdaya dan mandiri untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa ada ketergantungan dari pihak lain.

Tabel 1. Pesan Komunikasi Dalam Program Pemberdayaan Nelayan

Masalah	Pesan Komunikasi	Efek
Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran (promosi)	Penyuluhan dan penerangan tentang bentuk-bentuk promosi	Perubahan pengetahuan
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penggunaan teknologi Penangkapan	Demonstrasi penggunaan teknologi dalam penangkapan	Perubahan pengetahuan, kerampilan & sikap
Penangkapan hasil perikanan yang tidak ramah lingkungan.	Penyuluhan dan penerangan yang intensif tentang bahaya dari penggunaan bahan kimia terhadap diri sendiri, kesinambungan hasil tangkapan dan lingkungan	Perubahan pengetahuan
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penggunaan teknologi Penangkapan	Demonstrasi penggunaan teknologi dalam penangkapan	Perubahan pengetahuan, kerampilan & sikap

Kurangnya pengetahuan tentang pengolahan hasil laut	Penyuluhan pembuatan abon ikan dan pengolahan rumput laut	Perubahan pengetahuan
Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga.	Penyuluhan tentang pengelolaan keuangan	Perubahan pengetahuan, keterampilan & sikap
Keterbatasan alat tangkap	Bantuan Peralatan Tangkap	Perubahan Pendapatan
Tidak tersedia pasar untuk distribusi hasil olahan	Bantuan outlet / tempat memproseskan hasil olahan	Perubahan Pendapatan

Sumber : Data Primer Diolah. 2016.

Tabel 2. Hasil Analisis Matriks IFE

Faktor Internal	Bobot (A)	Rating (B)	Skor (AxB)
KEKUATAN			
Adanya kerjasama yang baik pada anggota kelompok	0,170	4	0,682
Adanya komunikasi yang baik antara anggota kelompok dengan pendamping atau penyuluh	0,091	4	0,364
Bahan baku mudah diperoleh	0,125	3,5	0,438
SDM baik	0,114	3,5	0,398
KELEMAHAN			
Produksi dilakukan berdasarkan pesanan	0,136	1	0,136
Hasil penjualan tidak dibayar secara langsung	0,148	1	0,148
Modal terbatas	0,102	2	0,205
Kesulitan pada penyediaan plastik kemasan	0,114	2	0,227
TOTAL	1,000	21	2,598

Sumber : Data Primer Diolah. 2016.

Berdasarkan hasil perhitungan matriks IFE pada Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa faktor kekuatan yang menduduki peringkat pertama dengan nilai tertimbang 0,682 adalah adanya kerjasama yang baik pada anggota

kelompok. Faktor ini menjadi salah satu kekuatan yang sangat penting pada peran komunikasi dalam pemberdayaan nelayan tradisional pada masyarakat pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pada faktor kelemahan, hasil penjualan tidak dibayar secara langsung memiliki nilai tertimbang tertinggi, yaitu 0,148. Hasil penjualan tidak dibayar secara langsung sangat memengaruhi dalam usaha perikanan yang dilakukan, karena secara langsung akan memengaruhi perputaran modal usaha. Bobot skor total diperoleh adalah 2,598. Hal ini menunjukkan bahwa peran komunikasi dalam pemberdayaan nelayan tradisional pada masyarakat pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki posisi internal yang sedang.

Tabel 3. Hasil Analisis Matriks EFE

Faktor Eksternal	Bobot (A)	Rating (B)	Skor (AxB)
PELUANG			
Sudah memiliki surat izin dari Balai POM dan memiliki status halal	0,200	4	0,8
Lokasi strategis untuk penyediaan bahan baku	0,144	4	0,578
Tersedia rumah produksi	0,133	4	0,533
Hasil produksi sudah pernah diikutsertakan pada pameran	0,056	3	0,167
ANCAMAN			
Belum menggunakan listrik pada rumah produksi	0,111	1	0,111
Belum memiliki persediaan air sendiri pada kegiatan produksi	0,078	2	0,156
Belum memiliki tempat khusus untuk penjualan hasil produksi	0,144	1	0,144
Pemasaran masih bersifat lokal	0,133	1	0,133
TOTAL	1,000	20	2,622

Sumber : Data Primer Diolah. 2016.

Berdasarkan hasil perhitungan matriks EFE pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa

faktor peluang yang menduduki peringkat pertama dengan nilai tertimbang 0,8 adalah sudah memiliki surat izin dari Balai POM dan memiliki status halal. Faktor ini menjadi salah satu peluang yang sangat penting dalam peran komunikasi dalam Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini juga didukung oleh faktor-faktor peluang lainnya, yang merupakan peluang cukup penting untuk diperhatikan.

Pada faktor ancaman, belum memiliki tempat khusus untuk penjualan hasil produksi memiliki nilai tertimbang tertinggi, yaitu 0,144 dan menjadi ancaman utama bagi usaha perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ancaman ini menjadi penghambat usaha perikanan bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ini diharapkan segera dapat diatasi dan diharapkan adanya suatu strategi yang akan dilaksanakan untuk dapat segera mengatasi masalah tersebut. Bobot skor total pada faktor eksternal adalah 2,622. Hal ini menunjukkan bahwa peran komunikasi dalam pemberdayaan nelayan tradisional pada masyarakat pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki posisi eksternal yang sedang.

Tabel 4. Hasil Analisis Matriks IE

		Skor Bobot Total IFE		
		Kuat 3,0-4,0	Sedang 2,0-2,99	Lemah 1,0-1,99
Skor Bobot Total EFE	Tinggi 3,0-4,0	3,0	2,598	2,0
	Sedang 2,0-2,99	3,0	2,622	2,0
	Rendah 1,0-1,99	2,0	1,0	1,0
		(I)	(II)	(III)
		(IV)	(V)	(VI)
		(VII)	(VIII)	(IX)

Sumber : Data Primer Diolah. 2016.

Peran Komunikasi Dalam pemberdayaan nelayan pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara menempati posisi Sel V. Sel V ini menggambarkan bahwa posisi peran komunikasi dalam Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara berada pada posisi menjaga dan mempertahankan Strategi yang tepat bagi program ini yang berada di sel ini (V) adalah strategi pengembangan.

Tabel 5. Matriks SWOT Peran Komunikasi Dalam Pemberdayaan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir

Faktor-faktor	Kekuatan (Strengths-S)	Kelemahan (Weakness-W)
Faktor Internal (Internal Factor)	1. Adanya kerjasama yang baik pada anggota kelompok (S1)	1. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan (W1)
	2. Adanya komunikasi yang baik antara anggota kelompok dengan pendamping atau penyuluh (S2)	2. Hasil penjualan tidak dibayar secara langsung (W2)
	3. Bahan baku mudah diperoleh (S3)	3. Modal terbatas (W3)
	4. SDM baik (S4)	4. Kesulitan pada penyediaan plastik kemasan (W4)
Faktor Eksternal (External Factor)		
Peluang (Opportunities-O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Sudah memiliki surat izin dari balai POM dan memiliki status halal (O1)	Memanfaatkan kerjasama yang baik pada anggota kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan yang sudah memiliki surat izin dari balai POM dengan memperbaiki proses penjualan yang tidak dibayar secara langsung (W2, O1)	Memanfaatkan peluang yang ada untuk mengambil keuntungan pada usaha yang sudah memiliki surat izin dari balai POM dengan memperbaiki proses penjualan yang tidak dibayar secara langsung (W2, O1)
2. Lokasi strategis untuk penyediaan bahan baku (O2)		
3. Tersedia rumah produksi (O3)		
4. Hasil produksi sudah pernah diikutsertakan pada pameran (O4)		
Ancaman (Threats-T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Belum menggunakan listrik pada rumah produksi (T1)	Memanfaatkan hubungan kerjasama yang baik pada anggota kelompok untuk menghindari adanya ancaman pada usaha yang	Meningkatkan usaha dengan meminimalkan penjualan yang tidak dibayar secara langsung dan menghindari
2. Belum memiliki persediaan air sendiri pada		

kegiatan produksi (T2)	belum memiliki tempat penjualan (S1, T3)	ancaman yang ada dengan memiliki tempat khusus untuk penjualan (W2, T3)
3. Belum memiliki tempat khusus untuk penjualan hasil produksi (T3)		
4. Pemasaran masih bersifat lokal (T4)		

Sumber : Data Primer Diolah. 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan secara umum bahwa kinerja pelaksanaan program pengembangan pembangunan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dikatakan belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh program yang dilakukan terhadap usaha kelompok tidak sampai pada tahap akhir, yaitu pemasaran hasil penjualan.

Alternatif strategi yang paling memungkinkan untuk peran komunikasi dalam Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain : memanfaatkan kerjasama yang baik pada anggota kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan yang sudah memiliki surat izin dari Balai POM dan memiliki status halal, memanfaatkan peluang yang ada untuk mengambil keuntungan pada usaha yang sudah memiliki surat izin dari Balai POM dengan memperbaiki proses penjualan yang tidak dibayar secara langsung, memanfaatkan hubungan kerjasama yang baik pada anggota kelompok untuk menghindari adanya ancaman pada usaha yang belum memiliki tempat penjualan, dan meningkatkan usaha dengan meminimalkan penjualan yang tidak dibayar secara langsung dan menghindari ancaman yang ada dengan memiliki tempat khusus untuk penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pelaksana program IFAD dapat tetap

melakukan pendampingan sampai pada tahap akhir, yaitu pada pemasaran hasil penjualan. Pelaksana program IFAD harus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masing masing kelompok usaha, seperti hasil penjualan yang tidak dibayar secara langsung dan tidak adanya tempat khusus untuk penjualan hasil usaha kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak terkait yang telah membantu memberikan dukungan dalam terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2007). *Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir*. Bandung: CV. Citra Praya.
- Beteste dan Rajasunderam, C. V. (Ed.). (1996). *Participatory Development Communication: A West African Agenda*. The International Development Research Center: Science for Humanity.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. (2012). *Program Pembangunan Masyarakat Pesisir Kabupaten Maluku Tenggara*. (ID): DKP, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perairan*. LKiS, Yogyakarta.
- Mubyarto dan Dove, M. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan (Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa)*. Jakarta :CV Rajawali.
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory*. Edisi Kedua. London : McMillanPress Ltd.
- Purwanto, I. (2006). *Manajemen Strategik*. Bandung (ID): Yrama Widya
- Satria, A. (2001). *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Satria, A. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Soedijanto. (1997). *Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Sebagai Salah Satu Alternatif Model*

Penyuluhan untuk Mendukung Pembangunan Pertanian di Awal Datangnya Millenium Baru. Presentasi Pertemuan Penyegaran Pemandu Lapangan. Malang : Univ. Brawijaya.

